

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan kali ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitian ini beserta persamaan dan perbedaan, antara lain :

1. Al Attar *et.al* (2016)

Penelitian Al Attar *et.al* (2016) memiliki tujuan untuk mengukur tingkat konservatisme dalam kebijakan akuntansi dan efek pada kualitas pengungkapan pelaporan keuangan pada bank komersial di Jordania. Data Penelitian diambil dari laporan keuangan bank jordania di *Amman Stock Exchange* dari periode 2005 hingga 2014 dengan sampel berjumlah 101 bank. Teknik Analisis yang digunakan adalah Analisis rata-rata aritmatika dan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan dari konservatisme akuntansi yang diukur dengan menggunakan rasio *accrual to profit* pada kualitas pengungkapan, tetapi tidak ketika menggunakan rasio *book value to market value*. Perbedaan hasil ini bisa disebut adanya faktor akuntansi murni dalam rasio *accrual to profit*, tetapi ada faktor lingkungan tambahan dalam rasio *book value to market value*.

Persamaan :

Variabel dependen yang digunakan memiliki kesamaan yaitu pengungkapan laporan keuangan dan variabel independen konservatisme akuntansi.

Perbedaan :

- a. Peneliti terdahulu hanya menggunakan variabel independen konservatisme akuntansi, sedangkan peneliti saat ini menambahkan variabel independen ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan *leverage*.
- b. Peneliti terdahulu mengadakan penelitian di Jordania, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Indonesia.
- c. Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada sektor perbankan, sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian pada sektor industri barang konsumsi.

2. Poulan dan Ghozali (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Poulan dan Ghozali (2015) bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* dan kondisi *financial distress* terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari bursa efek Indonesia. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi yang terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Pengujian data menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Secara simultan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit, kondisi *financial distress* berpengaruh

terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan Institusional, komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Variabel komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kondisi *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

Persamaan :

- a. Persamaan dalam variabel dependen *voluntary disclosure* dan variabel independen ukuran dewan komisaris, komite audit.
- b. Persamaan teknik analisis yang digunakan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu analisis regresi.

Perbedaan :

- a. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit, kondisi *financial distress*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen ukuran dewan komisaris, komite audit, komisaris independen, *leverage* dan konservatisme akuntansi.
- b. Periode penelitian sebelumnya adalah tahun 2010-2012, sedangkan periode penelitian saat ini dari tahun 2012-2015.
- c. Sampel perusahaan penelitian sebelumnya adalah perusahaan sektor aneka industri dan barang konsumsi, sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan sektor industri barang konsumsi.

3. Purwanto dan Wikartika (2014)

Penelitian Purwanto dan Wikartika (2014) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage*, *firm-size* dan *profitability* terhadap luas *voluntary disclosure* perusahaan telekomunikasi yang *go public*. Data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah data sekunder di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan 4 perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di bursa efek indonesia. Pengujian data dilakukan menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa *Leverage* dan *firm-size* berpengaruh terhadap *voluntary disclosure* karena dapat mengurangi keraguan *stakeholder* terhadap perusahaan. sehingga, perusahaan perlu menyediakan informasi tambahan yang lebih komperhensif. *Profitability* tidak berpengaruh terhadap *voluntary disclosure* karena dianggap penekanan pada laba perusahaan tidak mencerminkan penerimaan yang diharapkan investor.

Persamaan :

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah variabel dependen *voluntary disclosure* dan variabel independen *leverage*.

Perbedaan :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen *profitability*, *leverage* dan *firm-size*, sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel independen ukuran dewan komisaris, komite audit, komisaris independen, *leverage* dan konservatisme akuntansi.

- b. Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada sektor telekomunikasi sedangkan, peneliti saat ini melakukan penelitian pada sektor industri barang konsumsi.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan periode 2006-2010, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2012-2015.

4. Krishna (2013)

Penelitian Krishna (2013) memiliki tujuan untuk menguji pengaruh tingkat likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan reputasi kantor akuntan publik secara parsial atau positif terhadap pengungkapan sukarela pada sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data Penelitian ini didapatkan dari Bursa Efek Indonesia dengan sampel berjumlah 45 Perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan antara lain teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian dari Berdasarkan hasil uji statistik yang digunakan, menunjukkan bahwa tingkat likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengungkapan sukarela pada sektor industri manufaktur yang terdaftar di PT. Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008 hingga 2011.

Persamaan :

Persamaan penelitian sebelumnya adalah variabel dependen yang digunakan memiliki kesamaan yaitu *voluntary disclosure* dan variabel independen *leverage*.

Perbedaan :

- a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu adalah Likuiditas, *leverage*, Ukuran Perusahaan dan Reputasi KAP. sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel independen ukuran dewan komisaris, komite audit, komisaris independen, *leverage* dan konservatisme akuntansi.
- b. Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada sektor industri manufaktur. sedangkan, peneliti saat ini melakukan penelitian pada sektor industri barang konsumsi.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan periode 2008-2011, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2012-2015.

5. Zalloum et.al (2013)

Penelitian Zalloum *et.al* (2013) memiliki tujuan untuk mengungkap sejauh mana kepatuhan dengan indeks yang diusulkan pengungkapan dalam laporan keuangan pada kepemilikan saham publik Yordania perusahaan-perusahaan jasa dan sektor industri yang terdaftar di *Amman Stock Exchange* dan untuk mengungkapkan sejauh mana kepatuhan perusahaan Yordania 'dengan konsep konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan mereka dan untuk mengungkapkan dampak tingkat konservatisme akuntansi di pengungkapan. Sampel penelitian ini berjumlah 58 perusahaan yang *listing* di *Amman Stock Exchange* dengan analisis statistik deskriptif, *one sample T-test* dan regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya kepatuhan penuh pada pengungkapan menurut indeks yang diusulkan dari pengungkapan di perusahaan sektor industri dan jasa. Namun

hasil menunjukkan bahwa perusahaan pada sampel penelitian membayar banyak untuk pengungkapan. Oleh karena itu, para peneliti percaya bahwa salah satu kemungkinan interpretasi karena tidak memiliki kepatuhan penuh pada pengungkapan mungkin karena perubahan terus-menerus dan cepat dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan investasi yang tepat di samping keinginan manajemen untuk menyembunyikan informasi penting dan sensitif sehingga tidak diberikan kepada pesaing

Persamaan :

Variabel dependen yang digunakan memiliki kesamaan yaitu pengungkapan laporan keuangan dan variabel independen konservatisme akuntansi.

Perbedaan :

- a. Peneliti terdahulu hanya menggunakan variabel independen konservatisme akuntansi, sedangkan peneliti saat ini menambahkan variabel independen ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan *leverage*.
- b. Peneliti terdahulu mengadakan penelitian di Jordania, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Indonesia.
- c. Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada sektor perbankan, sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian pada sektor industri barang konsumsi.

6. Siagian dan Nugroho (2012)

Penelitian yang dilakukan Siagian dan Nugroho (2012) bertujuan untuk menganalisa praktik pengungkapan informasi strategis pada *website* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta menguji apakah ukuran dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, aktivitas komite audit, ukuran perusahaan, dan jenis industri berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi strategis secara sukarela pada *website* perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari bursa efek indonesia dengan sampel 126 perusahaan dari 426 perusahaan pada Bursa Efek Indonesia. Kemudian Data diolah menggunakan SPSS untuk melakukan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Ukuran dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan dengan arah negatif terhadap luas pengungkapan informasi strategis secara sukarela pada *website*. Aktivitas dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi strategis secara sukarela pada *website* perusahaan, namun hasil tersebut tidak signifikan secara statistik Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan dengan arah positif terhadap luas pengungkapan informasi strategis secara sukarela pada *website* perusahaan. Aktivitas komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan informasi strategis secara sukarela pada *website* perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan informasi strategis secara sukarela pada *website* perusahaan. Jenis industri berpengaruh

positif tidak signifikan terhadap luas pengungkapan informasi strategis secara sukarela pada *website* perusahaan

Persamaan :

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel dependen *voluntary disclosure* dan variabel independen Komite audit dan ukuran dewan komisaris.

Perbedaan :

- a. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen ukuran dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, aktivitas komite audit, ukuran perusahaan dan jenis industri, sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan variabel independen ukuran dewan komisaris, komite audit, komisaris independen, *leverage* dan konservatisme akuntansi.
- b. Indeks *item* pengungkapan yang digunakan penelitian sebelumnya berjumlah 8 *item*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan Indeks *item* pengungkapan yang berjumlah 40 *item*.
- c. Periode sampel penelitian sebelumnya adalah tahun 2011, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode sampel tahun 2012-2015.
- d. Sampel penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan non finansial, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan sektor industri barang konsumsi.

7. Prijanto dan Widianingsih (2012)

Penelitian Prijanto dan Widianingsih (2012) bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah terdapat pengaruh faktor-faktor seperti *leverage*, porsi saham publik dan umur perusahaan terhadap *voluntary disclosure* baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Data penelitiannya didapatkan dari laporan keuangan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Data diolah dengan menggunakan SPSS dengan teknik analisis Regresi Berganda. Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa Dari ketiga variabel *leverage*, porsi saham publik serta umur perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Secara parsial variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *voluntary disclosure* sedangkan porsi kepemilikan saham publik dan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*.

Persamaan :

Variabel dependen yang digunakan memiliki kesamaan yaitu *voluntary disclosure* dan variabel independen *leverage*.

Perbedaan :

- a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu adalah Saham Publik, *leverage* dan Umur Perusahaan. sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel independen ukuran dewan komisaris, komite audit, komisaris independen, *leverage* dan konservatisme akuntansi.

- b. Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur, sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.
- c. Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada perusahaan yang *listing* di bursa efek indonesia sampai dengan 31 Desember 2008. sedangkan, peneliti saat ini melakukan penelitian pada periode 2012-2015.

8. Haron (2010)

Penelitian Haron (2010) memiliki tujuan untuk menguji keterkaitan antara kepemilikan manajerial, efektifitas komite audit dalam kebijakan proporsi komisaris independen dan komite audit yang berkompeten pada pengungkapan sukarela. Data yang terkumpul untuk penelitian ini berasal dari bursa efek indonesia. Sampel Penelitian ini adalah 124 Perusahaan publik yang *lisitng* di bursa Malaysia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil Penelitiannya menyebutkan bahwa Bahwa kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Persamaan :

Variabel dependen yang digunakan memiliki kesamaan yaitu *voluntary disclosure* dan variabel independen komite audit.

Perbedaan :

- a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu adalah komite audit dan kepemilikan manajerial. sedangkan peneliti saat ini

menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, komite audit, komisaris independen, *leverage* dan konservatisme akuntansi..

- b. Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada perusahaan yang *listing* di bursa Malaysia pada tahun 2003. sedangkan, peneliti saat ini melakukan penelitian pada periode 2012-2015 di Indonesia.
- c. Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada perusahaan publik, sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian pada sektor industri barang konsumsi.

Tabel 2.1
TABEL MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU

No.	Nama Peneliti	Variabel Independen				
		Dewan komisaris	Komisaris Independen	Komite Audit	<i>Leverage</i>	Konservatisme Akuntansi
1.	Al Attar <i>et.al</i> (2016)	-	-	-	-	Signifikan
2.	Poulan dan Ghozali (2015)	Signifikan	Signifikan	Tidak Signifikan	-	-
3.	Purwanto dan Wikartika (2014)	-	-	-	Signifikan	-
4.	Krishna (2013)	-	-	-	Signifikan	-
5.	Zalloum <i>et.al</i> (2013)	-	-	-	-	Tidak Signifikan
6.	Siagian dan Nugroho (2012)	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan	Signifikan	-	-
7.	Prijanto dan Widianingsih (2012)	-	-	-	Tidak Signifikan	-
8.	Haron (2010)	-	-	Signifikan	-	-

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Agency Theory*

Teori keagenan mencoba menjelaskan tentang masalah agensi yang timbul karena adanya konflik kepentingan investor, kreditur, dan manajer. Konflik yang dimaksud dapat dilihat dari kebijakan dividen, pendanaan, dan kebijakan investasi (Jensen and Meckling, 1976). Informasi tentang perusahaan lebih banyak diketahui oleh manajer (agent) sebagai pengelola dibandingkan pemilik perusahaan (principal). Sehingga manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan (Jensen and Meckling, 1976). Hubungan antara prinsipal dan agen yang didalamnya agen bertindak atas nama dan kepentingan prinsipal dan atas tindakan tersebut agen mendapatkan imbalan tertentu (Suwardjono, 2013 : 485). Konflik antara agen dengan prinsipal dapat terjadi dikarenakan asimetri informasi dan *agency problem* antara agen dengan prinsipal.

Asimetri informasi terjadi ketika ada perbedaan informasi antara agen dengan prinsipal yang dapat mendorong terjadinya konflik. Agen sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai internal perusahaan dan prospek dibandingkan dengan prinsipal. Penggunaan informasi perusahaan oleh agen adalah untuk menentukan langkah stratejik agar perusahaan dapat *going concern* sedangkan penggunaan informasi oleh prinsipal adalah sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

Agency problem merupakan konsekuensi yang muncul akibat investor tidak berperan aktif dalam pengelolaan perusahaan. Kondisi ini memberikan

peluang bagi manajer untuk mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan, sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengantisipasi masalah tersebut.

Terdapat tiga macam biaya keagenan, yaitu :

1) Biaya *Monitoring*

Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi aktivitas dan perilaku agen dalam pengelolaan perusahaan dengan cara membayar auditor untuk mengaudit laporan keuangan dan membayar premi asuransi untuk perlindungan aset.

2) Biaya *Bonding*

Merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk memberi jaminan kepada prinsipal bahwa agen tidak melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan.

3) *Residual Loss*

Merupakan biaya yang ditanggung prinsipal untuk mempengaruhi keputusan agen agar meningkatkan kesejahteraan prinsipal.

Salah satu cara untuk mencegah asimetri informasi dan *agency problem* adalah dengan melakukan pengungkapan secara penuh baik berupa informasi keuangan maupun non keuangan. Pengungkapan yang bersifat sukarela dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan secara langsung maupun informasi yang tidak berkaitan dengan keuangan perusahaan secara langsung. Informasi yang disampaikan perusahaan kepada para *stakeholder* dimaksudkan agar dapat meningkatkan kepercayaan kepada perusahaan karena

perusahaan sudah berusaha lebih terbuka dengan para *stakeholder* mengenai internal perusahaan.

2.2.2 Teori Legitimasi

Legitimasi adalah sumber yang menentukan keberadaan perusahaan, karena organisasi berusaha memastikan kinerja operasionalnya dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat (Dowling dan Pfeffer dalam Fatoni, dkk : 2016). Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk terus-menerus meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas dan kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat karena dipandang sesuai dengan norma-norma dan batasan masyarakat dimana perusahaan berada. Teori legitimasi didasari oleh adanya kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dengan menggunakan sumber ekonomi (Chariri dan Ghazali, 2007:412). Pada situasi ini perusahaan menggunakan laporan tahunan untuk menggambarkan kesan tanggungjawab terhadap masyarakat sehingga perusahaan akan diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga laba yang diperoleh perusahaan akan semakin meningkat. Hal tersebut berfungsi untuk mendorong dan membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi.

Legitimasi mengalami pergeseran seiring dengan pergeseran masyarakat dan lingkungan sehingga perusahaan dituntut harus dapat menyesuaikan adanya perubahan tersebut baik terhadap produk, metode, dan tujuan sebab legitimasi diperoleh dari adanya kesesuaian antara keberadaan perusahaan yang tidak mengganggu atau sesuai dengan sistem nilai yang ada di dalam masyarakat dan

lingkungan. Ketika terjadinya pergeseran maka dapat menyebabkan ketidaksesuaian sehingga pada saat itu legitimasi suatu perusahaan dapat terancam. Perusahaan harus berorientasi dengan sistem keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat, dan karena dianggap sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada *society* maka operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan-harapan masyarakat (Hadi, 2011 : 88).

Salah satu cara perusahaan dalam menjaga legitimasinya adalah dengan bersikap transparan melalui *voluntary disclosure* pada laporan tahunan. Melalui *voluntary disclosure*, perusahaan berusaha menjaga transparansinya kepada masyarakat bahwa perusahaan melakukan kegiatan operasional pada batas-batas dan norma-norma masyarakat. Informasi yang diungkapkan secara sukarela oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan berpihak kepada masyarakat, karena perusahaan juga mengungkapkan informasi yang bersifat wajib sesuai peraturan yang berlaku.

2.2.3 Disclosure

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan (Suwardjono, 2013 : 578). Pengungkapan adalah bagian akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi kepada pemangku kepentingan dalam bentuk pelaporan keuangan dan non keuangan oleh perusahaan. Pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan berupa

pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Informasi yang wajib diungkapkan (*mandatory disclosure*) oleh perusahaan harus sesuai dengan pengungkapan wajib yang telah diatur oleh BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) pada peraturan nomor KEP-431/BL/2012 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Informasi yang wajib diungkapkan oleh perusahaan antara lain ikhtisar data keuangan penting, informasi saham (jika ada), laporan Direksi, laporan Dewan Komisaris, profil Emiten atau Perusahaan Publik, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik, tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. Muatan wajib yang harus diungkapkan oleh perusahaan pada laporan tahunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
DAFTAR MANDATORY DISCLOSURE

No	Indeks Pengungkapan Wajib
1	Ikhtisar Data Keuangan Penting;
2	Laporan Dewan Komisaris;
3	Laporan Direksi;
4	Profil Perusahaan;
5	Analisis Dan Pembahasan Manajemen;
6	Tata Kelola Perusahaan;
7	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
8	Laporan Keuangan Tahunan Yang Telah Diaudit;
9	Surat Pernyataan Tanggungjawab Dewan Komisaris Dan Direksi Atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan.

Sumber : SK BAPEPAM/ KEP-431/BL/2012

Voluntary Disclosure

Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas (Suwardjono, 2013 : 583). Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar pengungkapan wajib yang telah diatur oleh BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) pada peraturan nomor KEP-431/BL/2012 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Informasi sukarela yang diungkapkan perusahaan berupa informasi umum perusahaan, strategi perusahaan, *corporate governance*, informasi tinjauan keuangan, informasi proyek, informasi pegawai, informasi tanggungjawab sosial dan informasi grafik (Haron, 2010).

Tujuan perusahaan melakukan pengungkapan secara sukarela adalah agar meningkatkan kredibilitas dan menunjukkan kesuksesan perusahaan melalui informasi yang disampaikan kepada *stakeholder*. Meningkatnya kredibilitas perusahaan melalui informasi yang disampaikan kepada *stakeholder* akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* pada perusahaan untuk memberi dana yang diperlukan perusahaan.

2.2.4 *Corporate Governance*

Tata kelola organisasi (*corporate governance*) adalah menunjuk manajer untuk menjalankan perusahaan dalam aktivitas kesehariannya oleh para pemilik perusahaan dengan tujuan menjadikan perusahaan memiliki prestasi yang bagus dengan menunjukkan kinerja keuangan yang memuaskan (Handoko, dkk, 2012 : 4). Kerangka *corporate governance* harus menyajikan transparansi dan

pasar yang adil, dan alokasi sumber daya yang efisien. Harus konsisten dengan aturan hukum dan dukungan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaannya (G20/OECD *Principles of Corporate Governance*, 2015 : 13). *Stakeholder* berharap melalui *Corporate governance* juga dapat menjamin tidak terjadinya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan para *stakeholder*. Menurut pedoman umum yang dikeluarkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) tahun 2013 terdapat lima prinsip dasar pengolahan perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

1. Transparansi

Transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu bank harus dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. **Responsibilitas**

Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*.

4. **Independensi**

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas independensi (*independency*), Bank harus dikelola secara independen agar masing-masing organ Perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

5. **Kewajaran dan Kesetaraan**

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Melalui *voluntary disclosure*, perusahaan dapat mewujudkan asas akuntabilitas dan transparansi dari perusahaan kepada para *stakeholder*. Asas

akuntabilitas dan transparansi *corporate governance* dapat diimplementasikan melalui :

a. Ukuran Dewan komisaris

Dewan komisaris memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai pengawas secara kolektif dan memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Menurut penelitian Hasan (2013) Ukuran dewan komisaris yang besar dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan mengurangi masalah keagenan dan pengungkapan yang lebih transparan.

b. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan memperlakukan pemegang saham minoritas dengan jujur dan adil. Menurut penelitian Poulan (2015) bahwa komisaris independen dapat memberikan masukan kepada direksi terkait pengungkapan secara sukarela yang mungkin tidak sependapat dengan dewan direksi.

c. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk memeriksa dan mengawasi proses kendali internal perusahaan. Menurut penelitian Siagian (2012) bahwa aktivitas komite audit yang tinggi pada perusahaan maka dapat mengurangi asimetri informasi dalam pengungkapan sukarela.

2.2.5 *Leverage*

Rasio *leverage* menunjukkan seberapa jauh dana yang disediakan kreditur yang digunakan kelangsungan hidup perusahaan (Mamdud, 2016 : 79). Tujuan perhitungan rasio *leverage* adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan tingginya resiko yang ditanggung oleh perusahaan.

Untuk mengukur rasio *leverage* dapat menggunakan dua cara yaitu :

1. DAR (*Debt to Asset Ratio*)

Debt to Asset Ratio digunakan untuk mengukur keseimbangan proporsi antara aset perusahaan yang didanai oleh kreditur dan didanai oleh perusahaan, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{DAR (Debt to Asset Ratio)} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

Semakin tinggi nilai *Debt to Asset Ratio*, maka semakin buruk kondisi perusahaan. Jika nilai *Debt to Asset Ratio* kecil maka semakin baik kondisi perusahaan.

2. DER (*Debt to Equity Ratio*)

Debt to Equity Ratio digunakan untuk mengukur proporsi antara ekuitas perusahaan yang didanai oleh kreditur dan didanai oleh perusahaan, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{DER (Debt to Equity Ratio)} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Semakin tinggi nilai *Debt to Equity Ratio*, maka semakin buruk kondisi perusahaan. Jika nilai *Debt to Equity Ratio* kecil maka semakin baik kondisi perusahaan

2.2.6 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme merupakan reaksi yang berhati-hati atas ketidakpastian yang ada, sedemikian rupa agar ketidakpastian tersebut dan risiko bisnis bisa dipertimbangkan dengan cukup memadai (Mamduh, 2016 : 41). Konservatisme juga merupakan sikap dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan yang terjelek dari ketidakpastian tersebut (Suwardjono, 2013 : 245). Praktik dari konsep ini pada penyusunan pelaporan keuangan adalah mengakui kerugian terlebih dahulu namun tidak mengakui pendapatan atau laba yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Konservatisme yang diterapkan di Indonesia dapat dilihat didalam standar akuntansi keuangan Indonesia yaitu penilaian persediaan (PSAK No. 14).

Dampak dari penerapan konservatisme akuntansi berupa nilai aset yang lebih kecil dari yang seharusnya dan perbedaan antara nilai saham dengan nilai buku perusahaan. Perbedaan nilai saham dengan nilai buku perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan sedang tumbuh. Pertumbuhan perusahaan akan menyebabkan perhitungan laba normal akuntansi menjadi lebih kecil setiap tahunnya karena nilai laba normal akan tertutupi oleh penyusutan nilai aset perusahaan.

2.2.7 Pengaruh *Corporate Governance* dengan proksi Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Voluntary Disclosure*

Corporate governance yang diproksikan oleh ukuran dewan komisaris memiliki keterkaitan dengan *voluntary disclosure*. Dewan komisaris memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai pengawas secara kolektif dan memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Semakin banyak jumlah dewan komisaris pada perusahaan maka semakin baik tata kelola perusahaan tersebut sehingga semakin banyak informasi sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan tersebut. Menurut penelitian Hasan (2013) bahwa ukuran dewan komisaris yang besar dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan mengurangi masalah keagenan dan pengungkapan yang lebih transparan. Menurut penelitian Poulan (2015) bahwa semakin banyak dewan komisaris yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat pengawasan komisaris terhadap kebijakan direksi dalam pengungkapan sukarela.

2.2.8 Pengaruh *Corporate Governance* dengan proksi Komisaris Independen terhadap *Voluntary Disclosure*

Corporate governance yang diproksikan oleh komisaris independen memiliki keterkaitan dengan *voluntary disclosure*. Komisaris independen akan membuat dewan direksi lebih transparan karena komisaris independen tidak berafiliasi dengan manajemen dan memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan untuk kepentingan *stakeholder* secara independen, semakin besar proporsi komisaris independen pada perusahaan maka semakin baik tata kelola perusahaan tersebut sehingga semakin banyak

informasi sukarela yang diungkapkan pada perusahaan tersebut. Menurut Poulan (2015) bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen sehingga komisaris independen dapat memberikan masukan kepada direksi terkait pengungkapan secara sukarela yang mungkin tidak sependapat dengan dewan direksi.

2.2.9 Pengaruh *Corporate Governance* dengan proksi Komite Audit terhadap *Voluntary Disclosure*

Corporate governance yang diproksikan oleh komite audit memiliki keterkaitan dengan *voluntary disclosure*. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk memeriksa dan mengawasi proses kendali internal perusahaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh komite audit bertujuan untuk menjamin manajemen perusahaan bekerja sesuai fungsinya dan memperbaiki kualitas pengungkapan dan pelaporan keuangan, semakin banyak jumlah komite audit maka tata kelola perusahaan semakin baik sehingga semakin banyak informasi sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan. Menurut penelitian Siagian (2012) bahwa aktivitas komite audit yang tinggi pada perusahaan maka dapat mengurangi asimetri informasi dalam pengungkapan sukarela

2.2.10 Pengaruh *Leverage* terhadap *Voluntary Disclosure*

Rasio *Leverage* suatu perusahaan menunjukkan kondisi struktur modal perusahaan kepada *stakeholder*. Rasio yang baik dapat dilihat dari tingginya nilai perbandingan antara total hutang yang dimiliki perusahaan dengan total aset dari perusahaan. Kewajiban melaporkan informasi kepada pihak eksternal selain pengungkapan wajib juga dapat disertai dengan pengungkapan sukarela karena

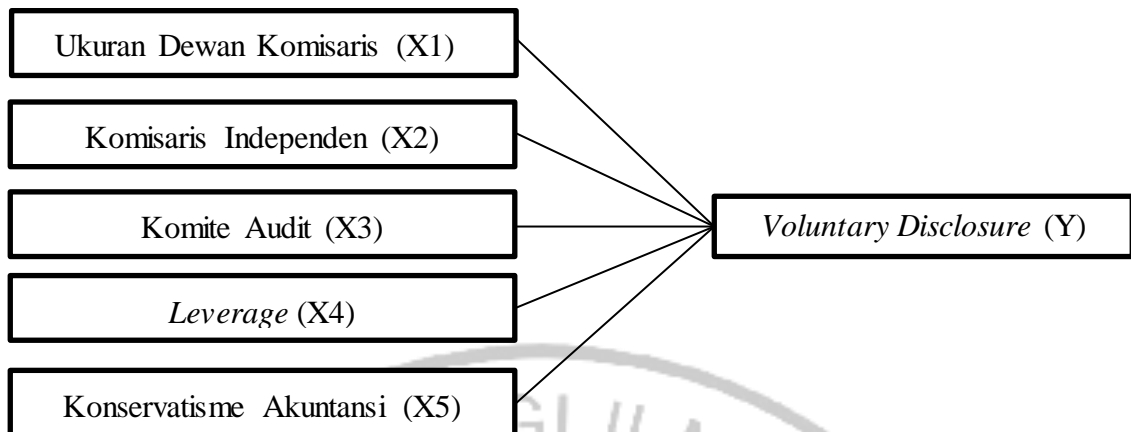
semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi pula tuntutan perusahaan untuk transparan sehingga semakin banyak informasi sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan. Menurut penelitian Purwanto (2014) bahwa semakin transparan perusahaan maka dapat mengurangi keraguan pihak eksternal pada perusahaan tersebut.

2.2.11 Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Voluntary Disclosure*

Konservatisme akuntansi mencegah terjadinya asimetri informasi antara pihak manajemen dengan pihak pemilik perusahaan. Konservatisme akuntansi cenderung melindungi investor dengan cara memberikan informasi yang akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam mengungkapkan informasi sukarela kepada *stakeholder*. Semakin tinggi tingkat konservatisme perusahaan maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melindungi investor pada ketidakpastian sehingga semakin banyak informasi sukarela yang diungkapkan. Menurut penelitian Al Attar *et.al* (2016) bahwa konservatisme akuntansi dapat menghasilkan tingkat pengungkapan terbaik yang sesuai dengan kepentingan investor dan kebutuhan mereka untuk informasi yang tepat waktu dan akurat tentang hasil perusahaan yang ditargetkan oleh mereka sebagai investasi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis tentang Pengaruh *corporate governance*, *leverage* dan konservatisme akuntansi terhadap *voluntary disclosure* sub sektor industri barang dan konsumsi. Kerangka pemikiran sebagaimana dijelaskan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3
KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis Penelitian

H₁ : ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*

H₂ : komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*

H₃ : komite audit berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*

H₄ : *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*

H₅ : konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*